

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Informasi merupakan data yang telah diolah sedemikian rupa, sehingga dapat dijadikan dasar bagi pengambilan keputusan. Informasi memegang peran yang sangat penting untuk mengetahui kegiatan apa yang telah terjadi, melakukan evaluasi apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan menjamin agar data tersebut dapat diolah secara efisien menjadi informasi yang akurat, dapat dipercaya, dan tepat waktu maka dalam pengolahan data tersebut diperlukan sistem informasi. Sistem informasi akuntansi dirancang sedemikian rupa oleh suatu organisasi atau lembaga sehingga dapat memenuhi fungsinya yaitu menghasilkan informasi akuntansi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, dengan sistem informasi akuntansi yang layak dapat dihasilkan suatu laporan yang mampu memberikan berbagai informasi yang berguna bagi pihak-pihak pengambil keputusan. Kemampuan untuk mengelola informasi secara efektif di dalam pemerintahan sangat penting karena dapat menjadi dasar untuk memperoleh *Good Governance*.

Tujuan penyusunan sistem informasi akuntansi sektor publik adalah untuk menyediakan informasi bagi pengambil kebijakan, untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun struktur informasi, untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.

Menurut Bastian (2010 :18), organisasi sektor publik tidak jauh berbeda dengan organisasi sektor swasta, salah satu ukuran yang akan membedakan kedua sektor tersebut adalah adanya produktivitas yang dihasilkan, tingkat produktivitas sektor swasta lebih tinggi dibandingkan sektor publik. Sistem informasi merupakan salah satu faktor yang menentukan produktivitas organisasi, pada sektor swasta untuk dapat meningkatkan produktivitas maka organisasi bersedia mengeluarkan biaya yang cukup tinggi untuk mengimplementasikan sistem informasi dalam setiap level oragnisasinya, namun pada organisasi sektor publik yang lebih meminimalkan biaya cenderung menggunakan sistem informasi untuk aktivitas-aktivitas sederhana saja (Rajesh Kumar, 2013).

Pemerintah sebagai organisasi sektor publik merupakan pendorong dan fasilitator dalam keberhasilan pembangunan, oleh karena itu keberhasilan pembangunan perlu didukung oleh kecepatan arus informasi dan data antar instansi supaya terjadi keterpaduan sistem antara pemerintah dengan pihak pengguna lainnya, selain itu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat, sehubungan dengan itu pemerintah berupaya mewujudkan pelayanan yang memadai kepada rakyat.

Sektor pemerintah, perubahan lingkungan strategis dan kemajuan sistem informasi akan mendorong aparatur pemeritahan untuk meningkatkan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Di Indonesia, penggunaan sistem informasi pada organisasi sektor publik atau lembaga pemerintahan masih sebatas penggunaan komputer untuk pengetikan dan mendukung proses administrasi semata. Fungsi teknik

informasi untuk proses pengolahan data dan transaksi yang kompleks serta penyediaan informasi publik masih jauh dari harapan, apalagi proses pengambilan keputusan berbasis sistem informasi masih belum menjadi fokus perhatian sehingga hal ini akan mempengaruhi kualitas penyediaan informasi publik untuk kepentingan masyarakat.

Upaya penerapan sistem informasi pada organisasi sektor publik masih mengalami beberapa kendala karena belum semua instansi menyelenggarakannya, hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi pada organisasi sektor publik belum dijalankan dengan efektif. Penggunaan sistem informasi yang kurang efektif tersebut akan berdampak negatif pada kinerja dan mutu pelayanan organisasi sektor publik pada masyarakat.

Mutu pelayanan bagi masyarakat perlu ditingkatkan oleh karena hal ini akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai organisasi sektor publik. Sistem informasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan organisasi sektor publik pada masyarakat, semakin tinggi mutu pelayanan bagi masyarakat maka semakin tinggi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah).

Pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah dilakukan dengan bantuan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibawahinya. SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah). Setiap SKPD menggunakan anggaran/ barang melalui pelaksanaan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa).

Pendapatan Desa yakni semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Adapun Pendapatan Desa berasal dari Pendapatan Asli Desa, yakni dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Lalu, Pendapatan Desa juga berasal dari transfer yakni Dana Desa, bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, Pendapatan Desa juga dapat berasal dari Pendapatan Lain-lain, yakni Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Belanja Desa yakni meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Adapun klasifikasi belanja desa terdiri atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga. Klafikasi belanja tersebut dibagi dalam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Dan seluruh kegiatan belanja tersebut bermuara pada kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Adapun penerimaan pembiayaan ialah sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal desa.

Sistem informasi yang diterapkan pada pemerintah daerah berupa "Sistem Informasi Pengelolaan SKPD", yang merupakan sistem informasi akuntansi terkomputerisasi bagi pemerintahan daerah serta semua SKPD yang dibawahinya. Sistem akuntansi pemerintahan daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran,sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tersedianya "Sistem Informasi Pengelolaan SKPD" diharapkan dapat membantu setiap SKPD, untuk melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan SKPD. "Sistem Informasi Pengelolaan SKPD" dibuat untuk mempermudah penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerapan sistem informasi pada pemerintahan daerah akan mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dan kinerja individu dalam pemerintah daerah tersebut.

Kinerja menggambarkan sampai seberapa jauh organisasi tersebut mencapai hasil ketika dibandingkan dengan kinerjanya terdahulu dibandingkan dengan organisasi lain (benchmarking) dan sampai seberapa jauh pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan." (Rara J, 2012).

Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (dalam Pasolong, 2011 : 176) menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Kinerja organisasi sendiri didefinisikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada organisasi dengan sebaik-baiknya guna mencapai sasaran yang telah disepakati (Rara J, 2012). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan (Fawzi, 2012) diketahui terdapat pengaruh signifikan secara parsial maupun simultan pengawasan intern dan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pemerintahan yang berada di Kota Tasikmalaya.

Hasil penelitian lain yang dilakukan pada organisasi non pemerintah yakni penelitian yang dilakukan oleh (Kristiani, 2011) Analisis Pengaruh

Efektivitas Teknologi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individual Pegawai PT. Kim Eng Sekuritas Indonesia juga menunjukkan hasil yang sama bahwa Efektivitas Teknologi Sistem Informasi Akuntansi yang diproyeksikan atau digambarkan oleh variabel kemampuan menyelesaikan tugas (X_1), ketersediaan Teknologi (X_2), Keamanan Sistem (X_3), Pemeliharaan Teknologi (X_4), Kompleksitas (X_5), Faktor sosial (X_6) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja individual (Y). Adapun besarnya pengaruh serta kemampuan efektivitas teknologi sistem informasi akuntansi menjelaskan hubungannya terhadap kinerja individual adalah sebesar 73,5%.

Mengingat pentingnya peran Sistem Informasi Akuntansi yang telah diuraikan diatas serta mengacu pada hasil kedua penelitian tersebut maka peneliti mengambil judul penelitian ***“PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA JIWAN KABUPATEN MADIUN ”***

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah keampuan teknik personal berpengaruh terhadap kinerja Pemerintahan Desa Jiwan Kabupaten Madiun ?
2. Apakah dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap kinerja Pemerintahan Desa Jiwan Kabupaten Madiun ?
3. Apakah program pelatihan dan pendidikan berpengaruh terhadap kinerja Pemerintahan Desa Jiwan Kabupaten Madiun ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui, menganalisis, menguji dan memberikan bukti secara empiris tentang pengaruh kemampuan teknik personal, dukungan manajemen puncak dan program pelatihan dan pendidikan terhadap kinerja Pemerintahan Desa Jiwan Kabupaten Madiun.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Operasional (Praktis)

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi instansi atau lembaga dalam upaya mewujudkan peningkatan kinerja daerah pada tingkat desa yang baik melalui penerapan sistem informasi akuntansi (SIA).

2. Manfaat Akademis

Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi sumber referensi bagi para mahasiswa/i dalam penerapan SIA untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang baik.